

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Kelas Sosial

Kelas sosial merupakan sesuatu yang melekat pada setiap individu dalam menjadi bagian dari masyarakat. Bimantara (seperti dikutip dalam Soekanto, 2013) menjelaskan bahwa menurut Aristoteles, setiap negara memiliki 3 (tiga) unsur kelas, yaitu kelompok yang kaya sekali, berada di tengah-tengah, dan melarat (hlm. 57). Ketiga unsur tersebut biasa dikenal dengan sebutan kelas atas (*upper class*), kelas menengah (*middle class*), dan kelas bawah (*lower class*). Lapisan sosial dalam masyarakat yang terbagi ke dalam kelas-kelas tersebut dapat dijumpai secara nyata dalam kehidupan.

Adapun Prasetya (seperti dikutip dalam Ningsih, 2010) menyatakan bahwa kelas sosial merupakan pengelompokan golongan sosial masyarakat dari kelas atas atau borjuis dan masyarakat kelas bawah atau proletar (hlm. 93). Kelas-kelas tersebut dikelompokkan berdasarkan pekerjaan, jabatan, hingga status sosial dari seseorang. Biasanya kelompok yang berada di kelas bawah (proletar) tidak memiliki kedudukan penting di daerahnya. Berbeda dengan kelompok yang berada di kelas atas, mereka memiliki kedudukan penting di daerah tertentu. Penghasilan di antara kedua kelas juga tentu berbeda. Dengan demikian, kelas sosial merupakan pembedaan dari kelompok-kelompok masyarakat ke dalam kelas secara hierarkis.

2.1.1. Indikator Kelas Sosial

Kelas sosial dalam masyarakat juga dipengaruhi oleh beberapa indikator. Zakia, Adisti, dan Asmarani (seperti dikutip dalam Damiani, 2017, hlm. 450) mengemukakan bahwa indikator yang mempengaruhi kelas sosial adalah:

1. Kekayaan dan penghasilan

Penghasilan atau pendapatan adalah sebuah hal yang dapat dilihat untuk mengukur daya beli atau status sosial. Dengan adanya penghasilan atau pendapatan, seseorang dapat mengetahui tingkat kesejahteraannya

serta status yang diperolehnya. Kekayaan dan penghasilan yang ada pada seseorang juga menunjukkan pola konsumsi yang dijalankan.

2. Pendidikan

Status sosial juga diukur dari tingkat pendidikannya. Ketika seseorang memiliki pendidikan yang tinggi, maka status atau posisinya di masyarakat juga semakin tinggi. Pendidikan juga berhubungan dengan penghasilan. Apabila seseorang dalam masyarakat memiliki tingkat pendidikan tinggi, maka semakin tinggi pula penghasilannya. Peran pendidikan juga berpengaruh pada nilai dan selera seseorang dalam masyarakat. Selain itu, pendidikan juga mempengaruhi bagaimana gaya seseorang dalam mengolah informasi.

3. Pekerjaan

Indikator ketiga yang mempengaruhi kelas sosial adalah pekerjaan. Pekerjaan merupakan hal yang berkaitan langsung dengan penghasilan/kekayaan dan pendidikan. Pekerjaan juga berkontribusi dalam membentuk status sosial seseorang. Hal tersebut terjadi karena jenis pekerjaan yang dilakukan akan berpengaruh dengan pola hidup, nilai, hingga aspek yang berhubungan dengan proses konsumsi seseorang.

2.1.2. Pengelompokan Kelas Sosial di Masyarakat

Bungin (2006) menyatakan bahwa kelas sosial dalam masyarakat terbagi menjadi tiga tingkatan hierarki (hlm. 49), yaitu:

1. Kelas sosial atas

Kelas sosial atas merupakan kelas sosial tertinggi pada tingkatan hierarki. Kelompok masyarakat yang tergolong pada kelas sosial atas hadir dalam jumlah yang terbatas dan memiliki kekayaan atau penghasilan, pendidikan, serta status sosial yang sangat tinggi. Dilihat dari status sosial mereka yang sangat tinggi, kelompok masyarakat kelas atas memiliki

kehidupan yang mapan dan konstan dengan keluarga. Rata-rata penghasilan kelas sosial berkisar lebih dari Rp3.500.000,00/bulan (Kautsar & Rakasiwi, 2021, hlm. 150).

Pengelompokan kelas sosial atas terbagi menjadi dua, yakni kelas atas-atas dan kelas atas-bawah. Kelompok yang tergolong pada kelas atas-atas adalah mereka yang memperoleh status sosial tinggi dari sejak lahir, maka kehidupannya didukung dengan kekayaan yang berlimpah. (Macionis, 2017, hlm. 270)

Berbeda dengan mereka yang tergolong pada kelas atas-bawah, kekayaan yang didapatkannya berasal dari usaha pribadi melalui pendapatan/penghasilan pekerjaannya. Bidang pekerjaan pada kelas sosial atas atau *upper class* adalah pemilik bisnis di perusahaan besar sebuah negara, misalnya di Indonesia adalah Perseroan Terbatas (PT) Telkom Indonesia. Selain itu, pejabat senior pemerintah juga tergolong pada kelas atas, contohnya seperti Dewan Menteri dan Dewan Eksekutif dari Kabinet yang mewakili cabang eksekutif.

2. Kelas sosial menengah

Kelas menengah merupakan tingkatan kedua dari hierarki kelas sosial. Kelompok masyarakat yang tergolong pada kelas ini adalah mereka yang memiliki kekayaan atau penghasilan dan pendidikan yang tinggi. Kelas sosial menengah dikelompokkan menjadi dua kelas, yakni kelas sosial menengah ke atas dan kelas sosial menengah ke bawah. Kelompok masyarakat kelas menengah ke atas biasanya melakukan penanaman modal serta memiliki kendaraan roda empat, seperti mobil untuk digunakan keluarga. Bidang pekerjaan yang dominan pada kelas menengah ke atas adalah pemilik bisnis usaha menengah seperti kuliner, *fashion*, agribisnis, otomotif, dan lainnya yang di mana beberapa tidak memerlukan badan hukum untuk pendiriannya. Selain itu, bidang pekerjaan lainnya meliputi akuntan, pengacara, insinyur, atau dokter (Macionis, 2017, hlm. 271).

Macionis (2017) menyatakan kelas sosial menengah ke bawah berbeda dari kelas menengah ke atas dari bidang pekerjaannya (hlm. 271). Beberapa profesi atau pekerjaan yang biasanya dianut adalah pekerja biasa, seperti guru sekolah, karyawan, petugas bank, hingga pejabat pemerintahan seperti pejabat administrasi, pejabat pengawas, dan pejabat pelaksana. Hidup masyarakat yang tergolong kelas menengah ke atas dapat dikatakan tenteram karena penghasilan yang tinggi. Rata-rata penghasilan kelas menengah berkisar antara Rp1.500.000 hingga Rp3.500.000,00/bulan (Kautsar & Rakasiwi, 2021, hlm. 150).

3. Kelas sosial bawah

Kelas sosial tingkat ketiga adalah kelas bawah. Kelompok masyarakat yang tergolong dalam kelas bawah adalah mereka yang memiliki penghasilan rendah karena pendidikannya yang tidak memadai. Beberapa dari kelompok kelas bawah juga tidak memiliki lapangan pekerjaan. Dari penghasilannya yang terhitung sedikit, masyarakat yang merupakan kelas bawah mengalokasikan dana tersebut untuk kebutuhan sehari-hari dan tidak bisa mengelola uang untuk kebutuhan masa yang akan datang (Sunarto, 2004).

Kelas sosial bawah juga terbagi menjadi dua, yakni kelas bawah atas dan kelas bawah-bawah. Pada kelas bawah atas, mereka masih memiliki pekerjaan yang tetap seperti buruh lepas, buruh pekerja harian, dan pekerja kasar. Namun untuk kelas bawah-bawah, biasanya mereka tidak memiliki lapangan pekerjaan dalam kesehariannya atau dengan kata lain masyarakat kelas bawah-bawah sering disebut sebagai pengangguran (Sunarto, 2004). Rata-rata penghasilan kelas bawah tergolong rendah dan berkisar kurang dari Rp1.500.000,00/bulan (Kautsar & Rakasiwi, 2021, hlm. 150)

2.2. Kelas Sosial dalam Film

Tidak hanya dijumpai dalam masyarakat, kelas sosial juga secara kasat mata dapat dilihat dari media massa, contohnya adalah film. Dalam mengangkat realitasnya, film berkaitan dengan beberapa bidang, seperti ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Dari realitas tersebut, film juga dipertunjukkan dengan modifikasi secara fantasi dari pembuat film (Bimantara & Dharmawan, 2021, hlm. 57). Sobur (2013) juga menyampaikan bahwa film memiliki kekuatan untuk menjangkau segmen sosial dan mempengaruhi masyarakat. Dengan aspek komunikasi massa yang ada di dalamnya, pesan yang ingin disampaikan oleh sang pembuat film disuguhkan dengan verbal dan non verbal yang dapat dipahami dengan respon masing-masing yang berbeda (hlm. 127).

Hubungan antara film dengan masyarakat berjalan secara linear, maka masyarakat dipengaruhi bahkan dibentuk dari pesan yang terdapat dalam sebuah film (Sobur, 2013, hlm. 127). Realitas yang bertumbuh dalam masyarakat selalu direkam oleh film dan digambarkan dalam sebuah stereotip. Salah satu realitas yang direkam adalah kelas sosial, di mana muncul pandangan dari stereotip terhadap masalah-masalah yang diangkat. Sebagai contoh, individu dapat melihat seseorang berada pada tingkatan kelas sosial tertentu berdasarkan pakaian atau properti yang melekat. Hal tersebut dapat terjadi karena tidak lepas dari peranan film yang mampu menggambarkan stereotip yang ada (Bimantara & Dharmawan, 2021, hlm. 57).

2.3. Semiotika Roland Barthes

Semiotika berasal dari bahasa Yunani, yakni *simeon* yang memiliki arti sebuah tanda. Semiotika merupakan ilmu yang mempelajari tentang tanda, di mana tanda tersebut menghasilkan makna tertentu. Dicituskan oleh Ferdinand de Saussure, sebuah tanda (*sign*) dikelompokkan menjadi penanda (*signifier*) dan petanda (*signified*). Penanda (*signifier*) adalah segala hal yang berwujud fisik, contohnya visual, gambar, dan bunyi (aspek material). Petanda (*signified*) adalah sebuah gambaran atau konsep yang menghasilkan makna dari hal yang ditandai. Keterkaitan antara penanda (*signifier*) dan petanda (*signified*) adalah hubungan

yang “diada-adakan”. Dengan demikian, kedua aspek tersebut tidak memiliki hubungan khusus antara bentuk dan makna (Prasetya, 2022, hlm. 94).

Ilmu semiotika dari Ferdinand de Saussure ini dibawa oleh Roland Barthes dengan menghubungkan semiotika dengan fenomena budaya. Hal tersebut terjadi karena Barthes ingin mengemukakan bahwa sebuah teks dibangun atau dianalisis berdasarkan tanda. Barthes mengembangkan semiotika dengan pemaknaan, yang terbagi menjadi makna denotasi dan konotasi. Prasetya (seperti dikutip dalam Junaedi, 2019), menyebutkan bahwa denotasi merupakan makna dengan arti yang sebenarnya, sedangkan konotasi merupakan makna yang terungkap berdasarkan pengalaman personal dan budaya (hlm. 94). Selain itu, terdapat sebuah mitos yang hadir untuk mengekspresikan nilai-nilai yang berlaku pada kurun waktu tertentu. Ketika sebuah film ditampilkan, penonton biasanya mengetahui makna film secara keseluruhan. Namun, jika film tersebut dianalisis terutama menggunakan semiotika, maka akan banyak makna yang dapat diungkapkan baik dari makna denotasi, konotasi, atau mitos.

2.4. Jawa Sentris

Indonesia merupakan negara milik semua penduduknya yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Semua hal yang ada di negara Indonesia menjadi kepunyaan bersama tanpa diskriminasi dari bidang suku, agama, bahasa, budaya, atau historiografi. Penduduknya juga menerapkan sama rata dan sama rasa sehingga antara masyarakat tidak timbul rasa iri dan disintegrasi bangsa karena saling memperlakukan yang sama dengan yang lain. Namun, dalam historiografinya terdapat diskriminasi yang kronis dan menjadi pertanyaan bagi banyak orang, di mana Jawa sangat diperhatikan bahkan dari awal sejarah (Malae & Pratama, 2017, hlm. 17). Mohammad (seperti dikutip dalam Lombard, 2002) menyatakan bahwa sejak zaman pra sejarah, pulau Jawa sudah menjadi pusat persilangan budaya dan jaringan lalu lintas maritim (hlm. 3). Adanya gunung-gunung vulkanik di pulau

Jawa membuat tanah subur dan cocok untuk kegiatan pertanian, kemudian letak Jawa yang strategis menjadikan Jawa sebagai tempat persilangan budaya.

Jawa sentris merupakan penekanan di mana posisi pulau Jawa adalah sebagai acuan atau pusat dengan porsi yang lebih banyak dibandingkan pulau-pulau lainnya di Indonesia. Porsi lebih banyak tersebut bisa dilihat dari segi geografis, sejarah, budaya, politik, bahkan hingga etnis masyarakat. Fokus pertumbuhan hanya dipusatkan di pulau Jawa. Data dari Biro Pusat Statistik tanggal 6 November 2017 membuktikan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pulau Jawa menempatkan posisi tertinggi dengan jumlah yang mencapai 58.51% dari total PDRB di Indonesia, disusul dengan urutan selanjutnya yaitu Sumatera dengan PDRB 21,54%, Kalimantan 8,10%, Bali dan Nusa Tenggara Timur 3,22%, Papua dan Papua Barat 2,47%, dan terakhir Sulawesi dengan 6,16%. Berdasarkan data tersebut dapat dikatakan bahwa aktivitas ekonomi Indonesia memang berpusat di pulau Jawa (Mohammad, 2017, hlm. 1).

